

INDEKS

DEMOKRASI

INDONESIA

PROVINSI SULAWESI UTARA **2017**



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI UTARA

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA PROVINSI SULAWESI UTARA

INDONESIA DEMOCRACY INDEX SULAWESI UTARA PROVINCE 2013-2017

Nomor Publikasi / *Publication Number*:

Katalog BPS / *BPS Catalogue* : 4601008.71

Ukuran Buku / *Book Size* : A4

Jumlah Halaman / *Number of Page* : iii + 34 halaman / *pages*

Naskah / *Manuscript* : Bidang Statistik Sosial

Gambar Kulit/ *Cover Design* : Bidang Statistik Sosial

Diterbitkan oleh / *Published by* : BPS Provinsi Sulawesi Utara

Dicetak oleh / *Printed by* :

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya.

May be cited with refers to source.

KATA SAMBUTAN

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan anugerahNya sehingga Publikasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2017 dapat diterbitkan. Publikasi ini menyajikan perkembangan skor IDI selama periode 2013-2017 yang dapat menunjukkan perubahan demokrasi di Provinsi Sulawesi Utara.

Terdapat empat aspek yang memengaruhi demokrasi, yaitu lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, dan peran media, yang semuanya direkam dari peristiwa yang terjadi di masyarakat. Proses pengumpulan data untuk menyusun IDI dilakukan dengan cara *review* dokumen, *Focus Group Discussion* (FGD), wawancara mendalam kepada organisasi masyarakat sipil, media, akademisi, dan tokoh-tokoh terkait yang paham dengan peristiwa-peristiwa yang dialami masyarakat di Sulawesi Utara. Metode pengumpulan data ini menjadi keistimewaan bagi IDI sebagai alat ukur demokrasi yang merangkum peristiwa.

Pada kesempatan ini, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang besar kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam segala aktivitas sehingga publikasi ini dapat disusun. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Manado, Desember 2018

Kepala

Ateng Hartono

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Sambutan	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Grafik	iii
Daftar Pustaka	34
I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup dan Data yang Digunakan	2
1.3 Sistematika Penulisan.....	3
II Konsep dan Metodologi Penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia	4
2.1 Konsep.....	4
2.2 Metodologi.....	5
2.2.1 Komponen Pengukuran.....	5
2.2.1.1 Aspek Kebebasan Sipil.....	5
2.2.1.2 Aspek Hak-Hak Politik	6
2.2.1.3 Aspek Lembaga Demokrasi	7
2.2.2 Pengumpulan Data.....	10
2.2.2.1 Telaah Media dan Dokumen	11
2.2.2.2 <i>Focus Group Discussion</i>	12
2.2.2.3 Wawancara Mendalam	12
2.2.3 Menentukan Bobot Indikator, Variabel, dan Aspek	14
2.2.4 Menghitung Indeks Setiap Indikator, Variabel, dan Aspek	14
III Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia di Sulawesi Utara	16
3.1 Capaian Demokrasi Sulawesi Utara, 2013-2017	16
3.2 Perkembangan Aspek Demokrasi Sulawesi Utara, 2013-2017	17
3.2.1 Aspek Kebebasan Sipil	18
3.2.2 Aspek Hak-Hak Politik.....	19
3.2.3 Aspek Lembaga Demokrasi	19
3.3 Perkembangan Variabel Demokrasi Sulawesi Utara, 2013-2017	20
3.4 Perkembangan Skor Indikator Demokrasi Sulawesi Utara	21
IV Perbandingan Indeks Demokrasi Indonesia Antarprovinsi di Indonesia,	
2013-2017	30
4.1 Gambaran Umum Indeks Demokrasi Indonesia	30
4.2 Perbandingan IDI antarprovinsi.....	31

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Aspek, Variabel, dan Indikator	9
Tabel 3.1 Perkembangan Skor Indikator IDI Sulawesi Utara, 2013-2017..	22
Tabel 4.1 Perkembangan IDI Berdasarkan Aspek dan Provinsi, 2016-2017	32

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 2.1 Alur Pelaksanaan Empat Metode Pengumpulan Data dalam Penyusunan IDI..	13
Grafik 3.1 Perkembangan Demokrasi Sulawesi Utara, 2013-2017	16
Grafik 3.2 Perkembangan dan Kesenjangan antar Aspek IDI Sulawesi Utara, 2013-2017	17
Grafik 3.3 Perkembangan Variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Sulawesi Utara, 2013-2017	24
Grafik 3.4 Perkembangan Variabel Kebebasan Berpendapat Sulawesi Utara, 2013-2017	25
Grafik 3.5 Perkembangan Variabel Kebebasan Berkeyakinan Sulawesi Utara, 2013-2017	25
Grafik 3.6 Perkembangan Variabel Kebebasan dari Diskriminasi Sulawesi Utara, 2013-2017	26
Grafik 3.7 Perkembangan Variabel Hak Memilih dan Dipilih Sulawesi Utara, 2013-2017.	26
Grafik 3.8 Perkembangan Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Sulawesi Utara, 2013-2017.....	27
Grafik 3.9 Perkembangan Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil Sulawesi Utara, 2013-2017	27
Grafik 3.10 Perkembangan Variabel Peran DPRD Sulawesi Utara, 2013-2017	28
Grafik 3.11 Perkembangan Variabel Peran Partai Politik Sulawesi Utara, 2013-2017.....	28
Grafik 3.12 Perkembangan Variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah Sulawesi Utara, 2013-2017	29
Grafik 3.13 Perkembangan Variabel Peran Peradilan yang Independen Sulawesi Utara, 2013-2017	29
Grafik 4.1 Perkembangan IDI Nasional, 2013-2017	30
Grafik 4.2 Perkembangan Indeks Aspek IDI Nasional, 2013-2017	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menjadi negara yang menganut paham demokrasi perwakilan. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, atau yang disebut pemerintahan “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”, dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Perjalanan demokrasi di Indonesia telah berjalan selama empat periode, yaitu dimulai dari masa revolusi (1945-1950), dilanjutkan masa orde lama (1950-1965), kemudian masa orde baru (1966-1998), dan kini masa reformasi (1999-sekarang).

Pemerintah kemudian membuka peluang yang lebih luas untuk melakukan demokratisasi dengan mengeluarkan tiga UU politik baru yang lebih demokratis pada awal 1999 dan amandemen UUD 1945 yang bertujuan untuk menegakkan demokrasi secara nyata dalam sistem politik Indonesia. Demokratisasi pada tingkat pemerintah pusat dan tingkat pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) dilakukan secara bersamaan. Berselang UU Politik dikeluarkan, diterbitkan pula UU Pemerintahan Daerah yang memberikan otonomi yang luas kepada daerah-daerah.

Searah dengan perkembangan demokratisasi di tingkat pusat, penguatan kedudukan dan fungsi DPRD di tingkat provinsi (termasuk tingkat kabupaten/kota) juga dilakukan sehingga DPRD mempunyai kedudukan yang sama dengan gubernur. Anggota DPRD provinsi dipilih langsung melalui pemilihan umum (pemilu) yang demokratis. Peran DPRD sebagai lembaga legislatif daerah adalah bersama-sama dengan gubernur selaku kepala eksekutif membuat peraturan daerah (perda). Demikian, demokratisasi telah membawa perubahan politik baik di tingkat pusat dan daerah sekaligus menjadi sarana untuk membentuk sistem

politik demokratis yang memberikan perluasan hak kepada rakyat sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dapat dicegah.

Dinamika demokrasi di berbagai provinsi di Indonesia menunjukkan perlu ada ukuran kuantitatif, suatu angka yang dapat menggambarkan perkembangan demokrasi. Oleh karena itu, pada tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Kementerian Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia mulai menghitung Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indeks komposit yang mengukur perilaku demokrasi dari empat unsur, yaitu: eksekutif, legislatif, yudikatif, serta masyarakat luas. Disamping itu, IDI dibangun berdasarkan ciri khas Indonesia dengan latar belakang perkembangan sosial politik di Indonesia.

Bagi akademisi, keberadaan data IDI merupakan kemajuan dalam studi perkembangan demokrasi di Indonesia karena menjadi lebih terukur dan dapat dibandingkan. Bagi perencanaan pembangunan politik pada tingkat provinsi, angka IDI mampu menunjukkan aspek atau variabel atau indikator yang tidak atau kurang berkembang di sebuah provinsi sehingga dapat diketahui langkah yang perlu diambil baik oleh pemerintah pusat dan daerah untuk mengembangkan demokrasi di provinsi bersangkutan.

Sementara bagi pemerintah dan masyarakat provinsi, adanya IDI dapat menunjukkan kemajuan/kemunduran demokrasi di tingkat provinsi. Data-data indikator dalam IDI berguna bagi pemerintah daerah provinsi dan masyarakatnya sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan demokrasi dan perbaikan kualitas penyelenggaraan demokrasi. Pemerintah daerah dan masyarakat di provinsi bersangkutan secara bersama-sama dapat mengambil langkah-langkah perbaikan sehingga skor indeks untuk setiap indikator bisa meningkat di masa mendatang.

1.2. Ruang Lingkup dan Data yang Digunakan

Ruang lingkup publikasi ini secara umum membahas perkembangan demokrasi di Sulawesi Utara periode 2013-2017. Pada bagian akhir disajikan pula

perbandingan Indeks Demokrasi Indonesia level nasional dan antarprovinsi di Indonesia selama periode 2013-2017.

1.3. Sistematika Penulisan

Bab I menjelaskan latar belakang penyusunan, ruang lingkup, dan data yang digunakan serta sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan tentang konsep dan metodologi penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia.

Bab III membahas tentang perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia dari berbagai aspek, variabel, dan indikator di Sulawesi Utara tahun 2013-2017.

Bab IV membahas Indeks Demokrasi Indonesia level nasional dan Sulawesi Utara diantara provinsi lainnya di Indonesia 2013-2017.

BAB II

KONSEP DAN METODOLOGI

2.1. Konsep

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah pengukuran kondisi demokrasi yang dibangun dengan latar belakang perkembangan sosial politik Indonesia. Oleh karena itu, perumusan konsep demokrasi maupun metode pengukurannya, IDI mempertimbangkan ciri khas persoalan Indonesia secara umum dan secara khusus di Sulawesi Utara.

Sedikitnya ada dua karakteristik utama dari praktik demokrasi, yaitu adanya perluasan peran masyarakat dan reformasi kelembagaan demokrasi yang dilakukan secara menyeluruh. Namun, perluasan peran masyarakat ini lebih banyak merefleksikan kontestasi politik dan reformasi kelembagaan juga belum banyak memberikan kontribusi terhadap pemenuhan janji demokrasi karena belum didukung oleh perilaku demokrasi yang inheren di kalangan masyarakat maupun pemerintah.

Dengan mempertimbangkan aspek teoritis dan empiris, maka dibentuklah empat prinsip dasar penyusunan IDI. Pertama, IDI hanya mengukur perkembangan demokrasi politik di tingkat provinsi. Kedua, IDI hanya mengindikasikan potret demokrasi di provinsi secara umum bukan studi etnografi yang memberikan gambaran secara utuh dan lengkap mengenai demokrasi provinsi. Ketiga, IDI mengukur demokrasi dari dua sisi, yaitu sisi pemerintah dan masyarakat, yaitu merekam kinerja kelembagaan demokrasi sekaligus perilaku demokrasi di pelaku demokrasi. Keempat, IDI bukan tujuan akhir melainkan tujuan antara untuk merealisasikan kehidupan masyarakat yang bebas, aman, adil, dan sejahtera. Untuk mencapai hal ini, IDI diharapkan dapat menjadi rujukan dalam berbagai kajian akademis maupun formula kebijakan dan program pembangunan politik.

2.2 Metodologi

2.2.1 Komponen Pengukuran

Tantangan dalam penghitungan IDI adalah menerjemahkan dan merumuskan seluruh pertimbangan kerangka konseptual ke dalam konsep yang operasional. Ada dua implikasi dari tantangan ini, yaitu melakukan deduksi logis dari kerangka konseptual ke dalam aspek, variabel, dan indikator yang terukur; merumuskan metodologi.

Ada beberapa kriteria yang secara sistematis dipakai dalam pemilihan variabel dan indikator, yakni relevansi, signifikansi, dan ketersediaan data. Variabel dan indikator yang digunakan dalam IDI harus benar-benar relevan terhadap demokrasi yang hendak diukur, ada kontribusi yang signifikan terhadap kondisi demokrasi di provinsi, serta harus dipastikan bahwa data-data penyusun indikator tersedia. Indikator yang secara teoritik relevan tidak dapat digunakan bila datanya tidak tersedia sehingga ketersediaan data menjadi faktor yang sangat menentukan.

Dengan demikian, dalam menyusun IDI terdapat tiga aspek yang dijadikan sebagai objek kajian, yaitu kebebasan sipil, hak politik, dan kelembagaan demokrasi. Aspek pertama dan kedua merefleksikan esensi konsep demokrasi. Namun, kedua aspek tersebut tidak mungkin dapat bekerja secara maksimal tanpa adanya aspek kelembagaan demokrasi.

2.2.1.1 Aspek Kebebasan Sipil

Kebebasan sipil didefinisikan sebagai kebebasan individu/warga negara dan kelompok individu untuk berkumpul dan berserikat, berpendapat, berkeyakinan, serta kebebasan dari diskriminasi dan pengekangan yang berasal dari individu/warga negara lainnya, kekuasaan negara, dan kelompok masyarakat tertentu. Namun demikian, dalam konteks IDI, kebebasan sipil dibatasi hanya pada kebebasan individu dan kelompok yang berkaitan erat dengan kekuasaan negara dan atau kelompok masyarakat tertentu.

Dalam penyusunan IDI, aspek Kebebasan Sipil diturunkan ke dalam sejumlah variabel, sbb:

- 1) Kebebasan Berkumpul dan Berserikat. Berkumpul adalah aktivitas kemasyarakatan berbentuk pertemuan yang melibatkan lebih dari dua orang, sedangkan berserikat adalah mendirikan atau membentuk organisasi, baik terdaftar atau tidak terdaftar di lembaga pemerintah.
- 2) Kebebasan Berpendapat adalah kebebasan individu dan kelompok untuk mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak, dan perasaan, tanpa adanya rintangan berupa tekanan fisik, psikis dan pembatasan.
- 3) Kebebasan Berkeyakinan, yaitu kebebasan individu untuk meyakini kepercayaan atau agama di luar kepercayaan atau agama yang ditetapkan pemerintah, serta tidak adanya tindakan represi dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain yang menolak kebijakan pemerintah terkait dengan salah satu keyakinan.
- 4) Kebebasan dari Diskriminasi, yakni kebebasan dari perlakuan yang membedakan individu warga negara dalam hak didasarkan pada alasan gender, agama, afiliasi politik, suku/ras, umur, orang dengan HIV/Aids (ODHA), dan hambatan fisik.

Sementara menurut indikator, terdapat 10 indikator yang tercakup dalam Aspek Kebebasan Sipil, yaitu dua indikator pada variabel pertama dan kedua, dan masing-masing tiga indikator pada variabel ketiga dan keempat sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.1.

2.2.1.2 Aspek Hak-Hak Politik

Dalam konteks IDI, Hak-Hak Politik diturunkan menjadi dua variabel, yaitu:

- 1) Hak Memilih dan Dipilih, yaitu hak setiap individu untuk secara bebas memberikan suara dalam pemilihan pejabat publik dan untuk berkompetisi memperebutkan suara secara bebas dalam suatu pemilihan sebagai pejabat publik.
- 2) Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan. Dalam konteks politik, hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai

proses politik, misalnya hak pilih dalam pemilu. Selain itu, keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan maupun pengawasan keputusan. Keterlibatan masyarakat dapat dilihat dari frekuensi keterlibatan baik secara individu maupun kelompok dalam berbagai kegiatan seperti *hearing*, demonstrasi, mogok, dan semacamnya. Sementara pengawasan oleh masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk pelaporan/pengaduan terhadap penyelenggaraan pemerintahan melalui *press statement*, pengaduan kepada kepolisian, dan prakarsa media memuat berita terkait dengan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

Aspek Hak-Hak Politik memiliki tujuh indikator yang terdiri dari lima indikator pada variabel pertama dan dua indikator pada variabel kedua (lihat Tabel 2.1).

2.2.1.3 Aspek Lembaga Demokrasi

Seperti dikemukakan pada ulasan sebelumnya, kebebasan sipil dan hak-hak politik sebagai pilar dari konsep demokrasi tidak mungkin dapat teraktualisasi secara maksimal tanpa didukung oleh lembaga-lembaga demokrasi.

Untuk tujuan pengukuran IDI, Aspek Lembaga Demokrasi diturunkan ke dalam sejumlah variabel berikut:

- 1) Pemilihan Umum (Pemilu) yang Bebas dan Adil yaitu pemilu yang memenuhi standar demokratis, yang dicerminkan oleh, antara lain: adanya kesempatan yang sama dalam kampanye, tidak adanya manipulasi dalam penghitungan suara, tidak adanya intimidasi dan kekerasan fisik dalam memberikan suara.
- 2) Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah efektivitas pelaksanaan fungsi parlemen/DPRD dalam rangka konsolidasi demokrasi. Hal ini penting untuk dilihat, karena parlemen merupakan representasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan supremasi kekuasaan sipil. Parlemen yang efektif, yakni yang memprioritaskan kepentingan masyarakat,

diindikasikan oleh antara lain: adanya tingkat partisipasi dan kontestasi politik yang tinggi; berjalannya mekanisme *check and balance*; akuntabilitas politik yang tinggi; dan adanya hubungan yang kuat antara politisi dengan konstituen.

- 3) Peran Partai Politik, suatu kelompok yang terorganisir dengan orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama, bertujuan untuk memperoleh kekuasaan dan kedudukan politik dengan cara konstitusional dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Terdapat beberapa fungsi dari partai politik, antara lain fungsi penyerapan aspirasi masyarakat, fungsi komunikasi politik, fungsi pengkaderan dan rekrutmen calon-calon pemimpin politik, dan fungsi sosialisasi politik.
- 4) Peran Birokrasi Pemerintahan Daerah, yaitu keterbukaan dan kesungguhan pemerintah daerah dalam menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan transparansi dalam penentuan kebijakan dan anggaran.
- 5) Peradilan yang Independen adalah pelaksanaan *rule of law* yang bebas intervensi, penegakan hukum yang konsisten dan kesetaraan di hadapan hukum. Hal ini penting karena supremasi hukum merupakan landasan demokrasi. Peradilan yang bebas dari intervensi birokrasi dan politik (dan cabang kekuasaan yang lainnya), serta penegakan hukum yang konsisten mengindikasikan bahwa supremasi hukum dijunjung tinggi.

Pada tingkat indikator, terdapat 11 indikator pada Aspek Lembaga Demokrasi, yaitu dua indikator pada variabel pertama, ketiga, keempat dan kelima, serta tiga indikator pada variabel kedua (lihat Tabel 2.1).

Tabel 2.1
Aspek, Variabel, dan Indikator

No.	Aspek-Variabel-Indikator
ASPEK KEBEBASAN SIPIL	
Variabel I: Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	
1.	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat.
2.	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat.
Variabel II: Kebebasan Berpendapat	
3.	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat.
4.	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat.
Variabel III: Kebebasan Berkeyakinan	
5.	Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya.
6.	Tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya.
7.	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama.
Variabel IV: Kebebasan dari Diskriminasi	
8.	Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya.
9.	Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya.
10.	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya.
ASPEK HAK-HAK POLITIK	
Variabel V: Hak Memilih dan Dipilih	
11.	Kejadian dimana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat.
12.	Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih.
13.	Kualitas daftar pemilih tetap (DPT).
14.	Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu.
15.	Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD provinsi.
Variabel VI: Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	
16.	Jumlah demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan.

17.	Jumlah pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan.
ASPEK LEMBAGA DEMOKRASI	
Variabel VII: Pemilu yang bebas dan adil	
18.	Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu.
19.	Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.
Variabel VIII: Peran DPRD	
20.	Besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan per kapita.
21.	Jumlah jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan.
22.	Rekomendasi DPRD kepada eksekutif.
Variabel IX: Peran Partai Politik	
23.	Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu.
24.	Jumlah perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi.
Variabel X: Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	
25.	Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN.
26.	Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah.
Variabel XI: Peran Peradilan yang independen	
27.	Keputusan hakim yang kontroversial.
28.	Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi.

Dengan demikian, komponen pembentuk IDI 2013-2017 terdiri atas tiga aspek yang dirinci ke dalam 11 variabel dan 28 indikator. Meskipun terjadi perubahan pada indikator dalam variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah, tapi dari sisi jumlah indikatornya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, atau dengan kata lain, jumlahnya masih tetap.

2.2.2. Pengumpulan Data

Penyusunan IDI menggunakan metode triangulasi, yakni mengkombinasikan antara metode kuantitatif dan kualitatif sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi silang data yang didapat dengan metode yang lain. Ada empat metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

telaah media (analisis isi berita surat kabar), telaah dokumen (analisis isi dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah), *focus group discussion* (FGD), dan wawancara mendalam (*in-depth Interview*).

2.2.2.1 Telaah Media dan Dokumen

Telaah media dan dokumen dipilih sebagai salah satu teknik pengumpulan data, karena baik media maupun dokumen dianggap sebagai sumber informasi paling realistis untuk mendapatkan data kuantitatif (dalam kurun waktu pengamatan selama satu tahun) berkaitan dengan aspek, variabel, dan indikator IDI.

Surat kabar atau koran digunakan sebagai sumber informasi yang paling relevan dalam merekam kehidupan daerah termasuk hal-hal terkait proses demokratisasi selama satu tahun secara terus menerus dari hari ke hari. Meskipun demikian, IDI sepenuhnya menyadari keterbatasan koran seperti kemungkinan adanya bias editorial dan wartawan, keterbatasan jangkauan liputan, keterbatasan ruang, dan keterbatasan keahlian wartawan. Oleh karena itu, untuk mengurangi bias yang muncul karena kelemahan-kelemahan dalam metode telaah koran inilah maka FGD dan wawancara mendalam juga dilakukan.

Dalam konteks penyusunan IDI, syarat pertama adalah merumuskan isu spesifik terkait aspek, variabel, hingga indikator penelitian. Syarat kedua adalah menentukan surat kabar terkemuka di masing-masing provinsi. Sementara untuk jenis dokumen resmi yang digunakan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan DPRD seperti Peraturan Daerah (Perda), Surat Keputusan Gubernur, Surat Keputusan DPRD, serta dokumen-dokumen resmi lainnya seperti data demonstrasi dari Kepolisian, dan data pemilih.

Provinsi Sulawesi Utara menggunakan Manado Post untuk penghitungan IDI periode 2011-2014. Selain merupakan koran terkemuka di Sulawesi Utara, koran ini menyajikan berita seluruh kabupaten/kota. Namun sejak tahun 2015, Manado Post digantikan dengan Radar Manado karena Manado Post dianggap kurang independen atau masih mendapat pengaruh kuat dari pemerintah.

2.2.2.2. Focus Group Discussion (FGD)

Kegiatan FGD memiliki peranan penting dalam upaya untuk meminimalkan bias informasi yang dijangkit melalui telaah media dan dokumen. Adapun tujuan FGD adalah untuk mendapatkan informasi tentang pendapat dan penilaian partisipan (verifikasi, konfirmasi, diskonfirmasi) atas data-data kuantitatif berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang telah berhasil dikumpulkan melalui telaah media dan dokumen; melakukan eksplorasi atas kasus-kasus yang memiliki tingkat relevansi tinggi terhadap indikator IDI; menggali informasi (data kualitatif) berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang belum didapatkan melalui telaah media dan dokumen.

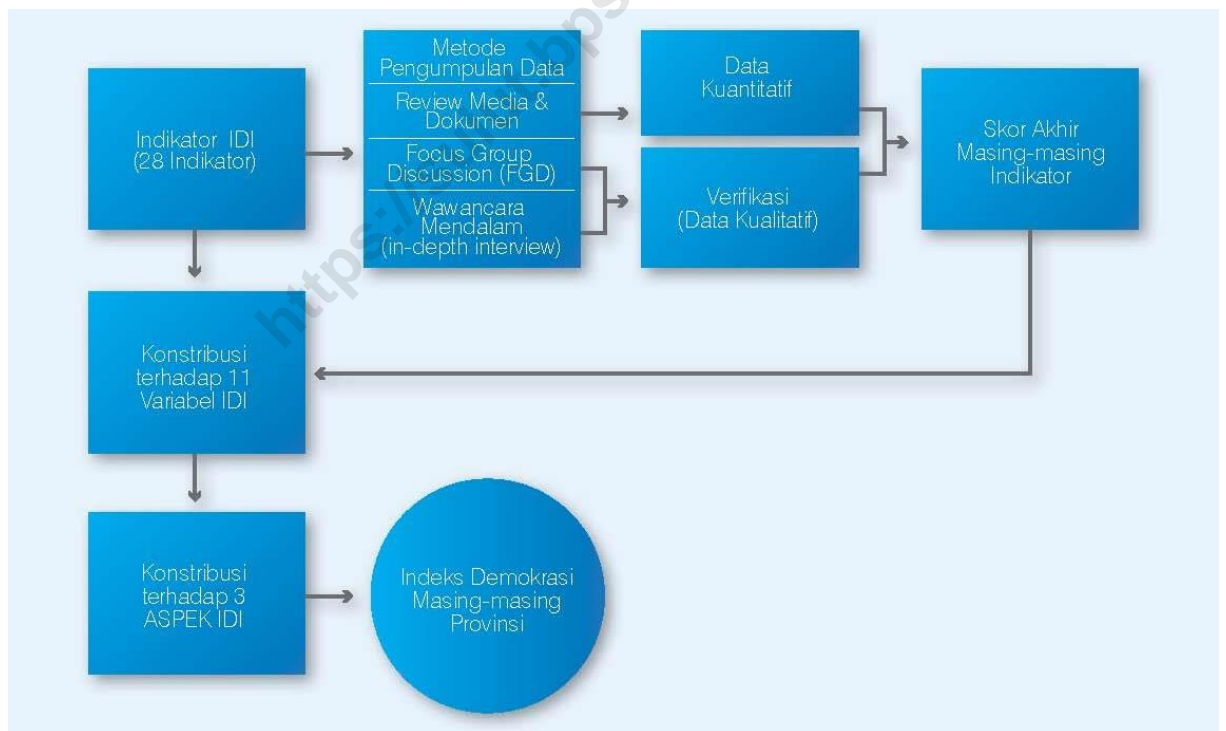
Kegiatan FGD IDI di Sulawesi Utara setiap tahunnya dilaksanakan setelah rangkaian 12 bulan telaah/koding koran dan dokumen dilengkapi. Pelaksanaan FGD IDI tidak dilakukan di lingkungan gedung kantor pemerintah untuk menjaga independensi informasi/data yang diperoleh dari peserta bahkan menghindari intervensi yang kuat yang mungkin terjadi dari pihak pemerintah daerah. Selama dua hari berturut-turut dilakukan pembahasan mengenai hal-hal yang terkait indikator-indikator pengukuran IDI. Acara FGD IDI dipimpin oleh seorang fasilitator yang memandu yaitu dari BPS Provinsi Sulawesi Utara. Peserta yang diundang dan yang menghadiri adalah dari akademisi, media serta berbagai elemen organisasi masyarakat, pemerintah, bahkan pihak kepolisian, pertahanan (TNI) dan peradilan (kejaksaan).

2.2.2.3. Wawancara Mendalam

Pada konteks penyusunan IDI, wawancara mendalam dilakukan untuk memverifikasi informasi yang telah diperoleh melalui telaah media dan dokumen serta FGD. Wawancara mendalam lebih bersifat komplementer karena melengkapi ketiga metode lainnya sehingga kegiatan ini baru dilakukan setelah FGD guna mendalami berbagai informasi terkait kasus-kasus yang belum terungkap secara maksimal dalam FGD.

Dengan demikian, penghitungan indeks untuk masing-masing indikator IDI ditetapkan dengan menggunakan data kuantitatif melalui dua metode yang pertama (telaah media dan dokumen) serta data kualitatif yang diperoleh melalui dua metode berikutnya (FGD dan wawancara mendalam).

Tahapan wawancara mendalam di Sulawesi Utara dilakukan dengan mengundang beberapa tokoh yang mengerti dengan permasalahan demokrasi di Sulawesi Utara, terutama mereka yang mengingat betul berbagai informasi dan peristiwa terkait indikator-indikator dalam penghitungan IDI. Oleh karena itu, BPS Provinsi Sulawesi Utara melakukan pengkajian sebelum akhirnya memutuskan tokoh yang akan diundang untuk dilakukan wawancara mendalam. Secara singkat, alur pelaksanaan empat metode pengumpulan data dalam penyusunan IDI dapat dilihat pada Grafik 2.1.



Grafik 2.1
Alur Pelaksanaan Empat Metode Pengumpulan Data Dalam Penyusunan IDI

2.2.3. Menentukan Bobot Indikator, Variabel dan Aspek

Aspek-aspek Kebebasan Sipil, Hak-hak Politik, dan Lembaga Demokrasi belum tentu memiliki kontribusi atau tingkat kepentingan yang sama dalam menentukan perkembangan demokrasi di Indonesia. Ketiganya memang penting, namun seberapa penting salah satu aspek relatif terhadap aspek yang lain tidak dapat diketahui. Hal demikian juga terjadi pada tingkat variabel dan indikator; sejauh mana kontribusi atau tingkat kepentingannya terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia tidak kita ketahui.

Oleh karena itu, dalam menghasilkan angka IDI, digunakan suatu penimbang melalui suatu proses terpisah menggunakan *Analytical Hierarchy Procedure* (AHP). AHP merupakan pendekatan metodologi untuk menentukan prioritas di antara sejumlah kriteria yang kompleks, dengan mengandalkan penilaian ahli. Penilaian ahli dilakukan dengan melakukan perbandingan secara berpasangan antar indikator penilaian. Dalam hal ini, terdapat 14 penilai ahli dalam AHP yang mewakili akademisi, politikus, masyarakat sipil dan tersebar secara cukup merata dalam hal gender.

Sementara untuk mengkaji hasil *review* koran dan dokumen dari enumerator ditugaskan empat orang Dewan Ahli IDI, yakni Prof. Dr. Maswadi Rauf dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Syarif Hidayat dari LIPI, Dr. Abdul Malik Gismar dari Universitas Paramadina, dan Prof. Dr. Siti Musdah Mulia dari UIN Syarif Hidayatullah.

2.2.4 Menghitung Indeks Setiap Indikator, Variabel, dan Aspek

Indeks indikator diawali dari pengolahan data hasil telaah surat kabar dan dokumen menjadi skor data kuantitatif, yang kemudian dipadukan dengan data kualitatif hasil FGD dan wawancara mendalam. Selanjutnya, ditimbang menggunakan penimbang indikator yang didapat melalui suatu proses terpisah yang disebut *Analytical Hierarchy Procedure* (AHP). Penimbang ini menentukan kontribusi masing-masing indikator terhadap variabelnya.

Dalam proses pembentukan skor aspek setiap variabel ditimbang menggunakan penimbang hasil AHP. Indeks aspek pada akhirnya menyumbang kepada Indeks Demokrasi Indonesia. Dari angka indeks yang dihasilkan, selanjutnya dapat diketahui kategori demokrasi di suatu provinsi (rendah, menengah atau tinggi).

Selanjutnya untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks demokrasi yang dihasilkan, skala 1–100 di atas dibagi ke dalam tiga kategori kinerja demokrasi, yaitu baik jika indeks > 80, sedang jika indeks 60 – 80, dan buruk jika indeks < 60.

Fluktuasi angka IDI adalah cerminan dinamika demokrasi. Sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas, IDI dirancang untuk peka terhadap perubahan kondisi demokrasi. IDI disusun secara cermat berdasarkan peristiwa sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi. Kondisi demokrasi suatu wilayah tidak hanya dibentuk dari satu aspek saja, tetapi banyak aspek, variabel dan indikator sesuai dengan kesepakatan penghitungan IDI. Oleh karena itu, diperlukan sinergitas untuk mempertahankan kondisi suatu aspek dengan tidak mengabaikan aspek lainnya agar tidak terjadi ketimpangan.

BAB III

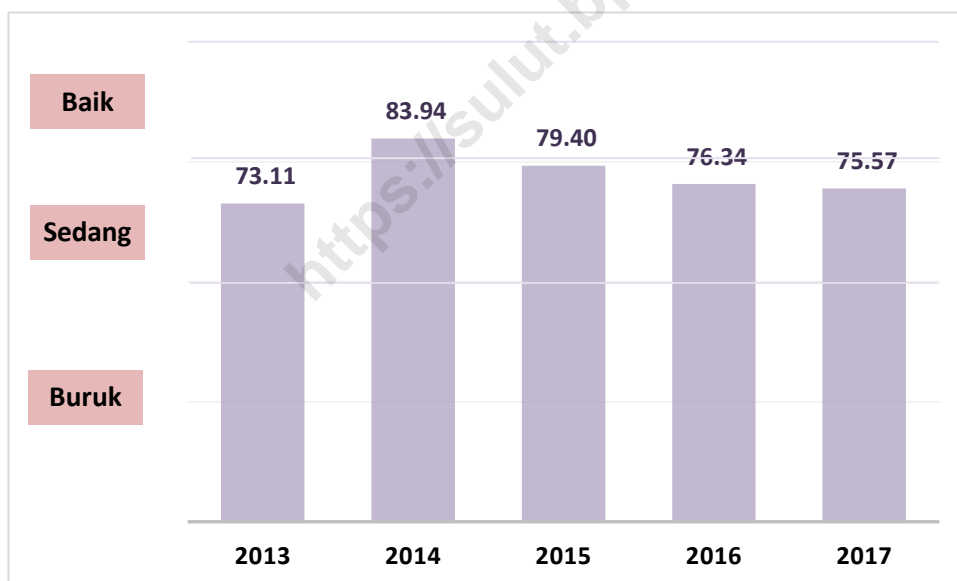
PERKEMBANGAN

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

DI SULAWESI UTARA

3.1. Capaian Demokrasi Sulawesi Utara 2013-2017

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, tren IDI Sulawesi Utara cenderung turun, meskipun sempat meningkat di tahun 2014. Skor terendah terjadi di tahun 2013 dan tertinggi di tahun 2014. Lonjakan capaian IDI yang cukup tinggi (10,83 poin) dari tahun 2013 ke tahun 2014 menaikkan kategori IDI Sulawesi Utara dari sedang menjadi baik. Dalam periode 2013-2017, tahun 2014 merupakan tahun dengan capaian IDI Sulawesi Utara terbaik.

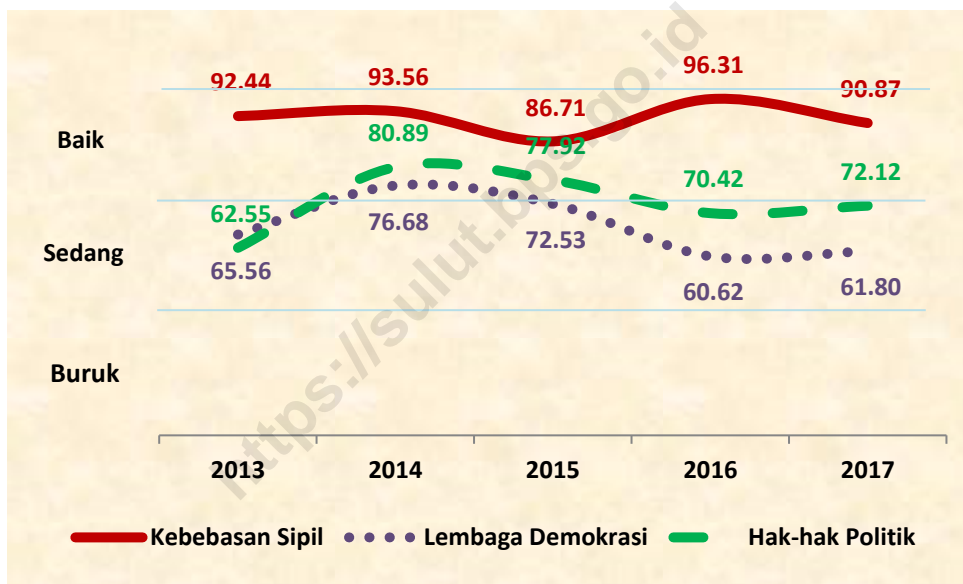


Grafik 3.1
Perkembangan Demokrasi Sulawesi Utara, 2013-2017

Pada tahun 2017, IDI Sulawesi Utara turun sekitar 0,77 poin dibandingkan tahun 2016. Pada tahun 2017 beberapa kejadian di Sulawesi Utara berakibat pada turunnya angka IDI Sulawesi Utara menjadi 75,57. Dengan nilai tersebut, tingkat demokrasi Sulawesi Utara masih berada dalam kategori sedang.

3.2. Perkembangan Aspek Demokrasi Sulawesi Utara 2013-2017

Grafik 3.2. menunjukkan bagaimana kecenderungan pergerakan atau perkembangan setiap aspek juga kualitasnya pada periode 2013-2017. Aspek-aspek IDI pada tahun 2017 memiliki skor 90,87 untuk aspek kebebasan sipil; 72,12 untuk aspek hak-hak politik, dan 61,80 untuk aspek lembaga demokrasi. Bila dibandingkan dengan tahun 2016, skor aspek hak-hak politik dan aspek lembaga demokrasi mengalami peningkatan, sedangkan skor aspek kebebasan sipil turun. Peningkatan skor tertinggi terjadi pada aspek hak-hak politik yaitu sebesar 1,70 poin, aspek lembaga demokrasi meningkat sebesar 1,18 poin. Sementara itu, aspek kebebasan sipil mengalami penurunan sebesar 5,44 poin.



Grafik 3.2
Perkembangan dan Kesenjangan antar Aspek
IDI Sulawesi Utara, 2013-2017

Aspek Kebebasan Sipil di Sulawesi Utara tahun 2017 memiliki skor tertinggi diantara aspek lainnya, sama seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Aspek kebebasan sipil meskipun mengalami penurunan, namun masih masuk kategori baik, sedangkan aspek hak-hak politik dan lembaga demokrasi tetap berada dalam kategori sedang.

Capaian aspek-aspek demokrasi Sulawesi Utara yang cukup bervariasi ini mengindikasikan adanya ketimpangan antara aspek kebebasan sipil, lembaga demokrasi, dan hak-hak politik. Ketimpangan ini pada gilirannya berpengaruh terhadap ragam dan kualitas kehidupan sosial dan politik di Sulawesi Utara. Kebebasan sipil yang tinggi, baik ruang kebebasannya maupun gairah untuk memanfaatkannya, telah mendorong partisipasi publik yang tinggi dalam mengawasi penyelenggaraan negara. Partisipasi ini seringkali melahirkan banyak tuntutan yang pada umumnya sah, namun bergulir menjadi ekspresi yang justru anti-demokrasi karena kinerja lembaga demokrasi yang belum optimal.

3.2.1 Aspek Kebebasan Sipil

Selama periode tahun 2013 – 2017, nilai yang ditunjukkan berfluktuasi. Pada tahun 2016 aspek kebebasan sipil menyentuh angka 96,31. Angka tersebut merupakan yang tertinggi selama periode lima tahun terakhir. Nilai aspek kebebasan sipil yang fluktuatif dapat dimaknai betapa sulitnya membangun demokrasi yang substansif, terutama dalam bidang pemenuhan hak-hak dasar kebebasan sipil masyarakat Indonesia, khususnya Sulawesi Utara. Hak-hak yang dimaksud meliputi hak kebebasan berkumpul dan berserikat, hak kebebasan berpendapat, hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta hak kebebasan dari semua bentuk diskriminasi.

Pada Tahun 2017, skor aspek kebebasan sipil yang terdiri dari empat variabel serta 10 indikator tercatat sebesar 90,87, turun 5,44 poin dibandingkan skor tahun 2016. Aspek ini merupakan satu-satunya aspek yang mengalami penurunan pada tahun 2017. Meskipun demikian, selama kurun waktu lima tahun terakhir, aspek ini masih termasuk dalam kategori baik.

Pemerintah dan masyarakat di Sulawesi Utara memiliki andil terhadap menurunnya skor aspek kebebasan sipil. Salah satu kejadian yang berasal dari pemerintah adalah ancaman dari aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat, ancaman dari aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat, tindakan atau pernyataan pejabat membatasi kebebasan

menjalankan ibadah agama, dan tindakan atau pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya. Sementara kejadian yang berasal dari masyarakat adalah adanya ancaman atau penggunaan kekerasan oleh sekelompok masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat.

3.2.2 Aspek Hak-hak Politik

Skor aspek ini selama kurun waktu lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014, aspek ini memiliki skor tertinggi yaitu 80,89 dan masuk dalam kategori baik. Namun pada tahun 2015 dan 2016, skor aspek ini terus menurun dan menjadikannya masuk dalam kategori sedang.

Skor aspek hak-hak politik pada tahun 2017 sebesar 72,12, meningkat 1,70 poin dibandingkan tahun 2016. Walaupun demikian, aspek hak-hak politik selama periode 2013-2017 masih tetap berada pada kategori sedang. Kenaikan skor aspek ini disebabkan oleh naiknya skor variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Salah satu kejadian di Sulawesi Utara yang menyebabkan naiknya aspek ini di tahun 2017 adalah berkurangnya jumlah demonstrasi atau mogok yang bersifat kekerasan.

3.2.3 Aspek Lembaga Demokrasi

Skor aspek lembaga demokrasi yang dibangun dari lima variabel dan sebelas indikator selama periode 2013-2017 memiliki tren yang cenderung menurun. Tahun 2016 nilai aspek ini mencapai titik terendah dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu 60,62.

Pada tahun 2017 aspek lembaga demokrasi bernilai 61,80, meningkat 1,18 poin dari skor tahun 2016. Kenaikan aspek ini didorong oleh naiknya nilai variabel peran DPRD dan variabel peran demokrasi pemerintah. Meskipun terjadi peningkatan, namun skor aspek ini mendekati kategori buruk.

3.3 Perkembangan Variabel Demokrasi Sulawesi Utara 2013-2017

Pada tahun 2017, lima dari sebelas variabel penyusun IDI mengalami penurunan. Sementara, nilai tiga variabel tidak berubah dan tiga variabel lainnya mengalami peningkatan. Lima variabel mengalami penurunan skor, berarti sekitar 45 persen variabel penyusun IDI Sulawesi Utara mengalami penurunan. Lima variabel yang mengalami penurunan adalah kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, kebebasan dari diskriminasi, dan peran partai politik. Tiga variabel yang mempunyai nilai yang tetap adalah hak memilih dan dipilih, pemilu yang bebas dan adil, dan peran peradilan yang independen. Sementara tiga variabel yang mengalami peningkatan skor adalah partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, peran DPRD dan peran birokrasi pemerintah daerah. Walaupun ada tiga variabel yang mengalami kenaikan skor, tetapi ketiga variabel tersebut belum mampu mengangkat skor total IDI Sulawesi Utara.

Nilai variabel kebebasan berkumpul dan berserikat turun signifikan dari 100,00 pada tahun 2016 menjadi 61,72 pada tahun 2017. Selama periode 2013-2016 variabel ini termasuk dalam kategori baik, bahkan tahun 2015 dan 2016 mencapai nilai yang sempurna. Namun adanya ancaman/penggunaan kekerasan baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat/kelompok masyarakat di Sulawesi Utara menyebabkan tercederainya kebebasan berkumpul dan berpendapat sehingga nilainya anjlok menjadi kategori sedang bahkan mendekati buruk.

Hak memilih dan dipilih, pemilu yang bebas dan adil, serta peran peradilan yang independen merupakan variabel yang memiliki skor tetap atau tidak berubah dari tahun sebelumnya. Skor dari ketiga variabel tersebut tetap berada pada nilai 79,83 untuk variabel hak memilih dan dipilih; 88,49 untuk variabel pemilu yang bebas dan adil; dan 100,00 untuk variabel peran peradilan yang independen. Ketiga variabel ini masih masuk dalam kategori baik.

Terlepas dari skor absolutnya, pada tahun 2017, ada empat variabel yang masih bertengger pada kategori baik, yaitu kebebasan berkeyakinan, kebebasan dari diskriminasi, pemilu yang bebas dan adil, peran partai politik, dan peran

peradilan yang independen. Variabel yang berada pada kategori sedang ada empat, yaitu kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, hak memilih dan dipilih, dan partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan.

Sementara itu, ada tiga variabel yang masih berkategori buruk, yaitu peran DPRD, peran partai politik, dan peran birokrasi pemerintah daerah. Ketiganya merupakan variabel penyusun aspek lembaga demokrasi. Hal ini merupakan salah satu penyebab lambatnya kenaikan nilai aspek lembaga demokrasi di Sulawesi Utara. Peran DPRD mempunyai nilai yang stagnan di kategori buruk sejak tahun 2013, sedangkan nilai peran birokrasi pemerintah daerah menurun cukup tajam pada tahun 2015 karena ada perubahan indikator penyusunnya. Peran partai politik pernah masuk dalam kategori baik pada tahun 2015 namun menurun tajam pada tahun selanjutnya.

Fluktuasi ini menandakan ketidakkonsistenan peran partai politik di Sulawesi Utara. Untuk meningkatkan aspek lembaga demokrasi, pemerintah daerah Sulawesi Utara harus melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, menciptakan wilayah bebas KKN, serta memperbaiki akuntabilitas kinerja. DPRD Sulawesi Utara harus lebih aktif melahirkan perda inisiatif dan melahirkan rekomendasi kepada eksekutif. Selain itu, pemerintah harus menyediakan informasi APBD yang transparan, dan partai politik secara konsisten melakukan peningkatan kualitas anggota partai, sehingga partai politik diharapkan dapat menghasilkan politikus yang handal.

3.4 Perkembangan Skor Indikator Demokrasi Sulawesi Utara

Pada IDI 2017 terdapat 16 indikator yang mencapai kinerja kategori baik (skor di atas 80) yaitu indikator 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 19, 24, 25, 27, dan 28. Namun, masih terdapat indikator yang berkategori buruk. Indikator-indikator yang termasuk dalam kategori tersebut adalah jumlah ancaman atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat, pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan,

jumlah Perda yang merupakan inisiatif DPRD, jumlah rekomendasi DPRD kepada eksekutif, kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu, dan upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah. Indikator yang berkategori buruk tersebut memerlukan perhatian khusus agar nilainya dapat membaik sehingga juga dapat mendongkrak aspek-aspek IDI Sulawesi Utara.

Pada tahun 2017 terdapat sembilan indikator yang mencapai skor sempurna atau 100, yang tersebar di ketiga aspek IDI. Indikator yang mencapai skor sempurna tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Perkembangan Skor Indikator IDI Sulawesi Utara, 2013-2017

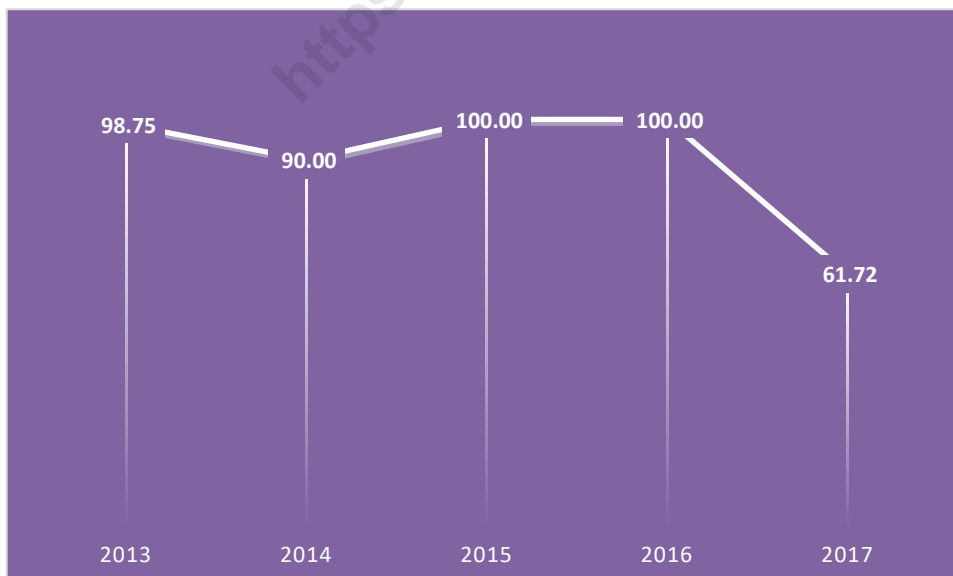
No. (1)	Indikator (2)	2013 (3)	2014 (4)	2015 (5)	2016 (6)	2017 (7)
	Kebebasan Sipil					
1	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100,00	90,00	100,00	100,00	62,50
2	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	90,00	90,00	100,00	100,00	56,25
3	Ancaman /penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	56,67	73,33	16,67	87,50	62,50
4	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	100,00	40,00	0,00	25,00	100,00
5	Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Tindakan/ Pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	90,00	100,00	90,63	100,00	90,63
7	Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama	90,00	90,00	70,00	100,00	100,00
8	Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
9	Tindakan/ Pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, dst	87,50	100,00	100,00	100,00	87,50
10	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Hak-Hak Politik					
11	Hak memilih atau dipilih terhambat	50,00	95,51	95,51	95,51	95,51

No. (1)	Indikator (2)	2013 (3)	2014 (4)	2015 (5)	2016 (6)	2017 (7)
12	Kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
13	Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)	30,00	74,07	74,07	74,07	74,07
14	<i>Voters turnout</i>	78,77	77,83	77,83	77,83	77,83
15	% Perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi	96,30	100,00	81,48	100,00	100,00
16	Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	59,57	63,91	55,43	71,74	80,43
17	Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	92,66	100,00	100,00	50,28	48,39
	Lembaga Demokrasi					
18	Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu	100,00	90,91	90,91	90,91	90,91
19	Kecurangan dalam penghitungan suara	94,94	86,08	86,08	86,08	86,08
20	Alokasi anggaran pendidikan Alokasi anggaran kesehatan	41,09	49,03	45,75	88,01	77,75
21	Perda yang merupakan inisiatif DPRD	25,00	12,50	0,00	25,00	0,00
22	Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif	0,00	7,14	3,57	3,57	3,57
23	Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu	0,00	52,86	100,00	14,29	0,00
24	Persentase perempuan pengurus partai politik	99,76	100,00	77,13	100,00	100,00
25	Penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan parpol	98,68	99,85	-	-	-
	Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN	-	-	86,84	51,58	100,00
26	Keterlibatan PNS dalam kegiatan parpol peserta pemilu	77,27	95,45	-	-	-
	Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah	-	-	16,67	25,00	25,00
27	Keputusan hakim yang kontroversial	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
28	Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

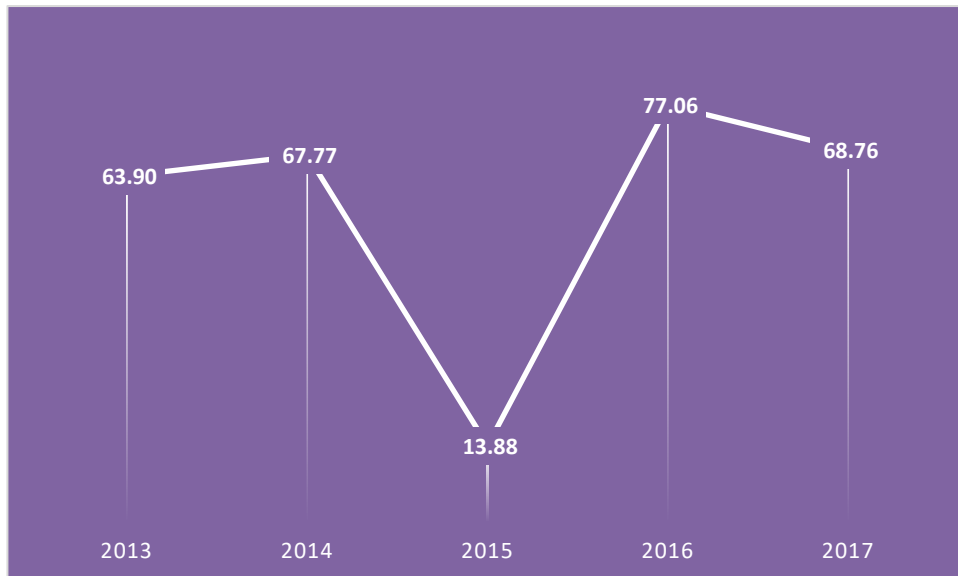
Disamping itu, ada dua indikator yang memiliki skor 0 (nol). Indikator tersebut adalah perda yang merupakan inisiatif DPRD dan kegiatan kaderisasi yang dilakukan oleh partai peserta pemilu. Hal inilah yang turut mendorong penurunan

nilai variabel, aspek, dan IDI Sulawesi Utara secara umum. Lambannya pertumbuhan aspek lembaga demokrasi yang menjadi permasalahan dapat diatasi dengan melihat indikator-indikator penyusun aspek ini. Indikator yang mempunyai skor terendah, yaitu Perda yang merupakan inisiatif DPRD, dan kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu harus menjadi prioritas. DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan partai politik sangat berperan terhadap dua indikator tersebut. Mengaktifkan kembali peran DPRD dan partai politik yang berkaitan dengan indikator ini akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan aspek lembaga demokrasi di Sulawesi Utara.

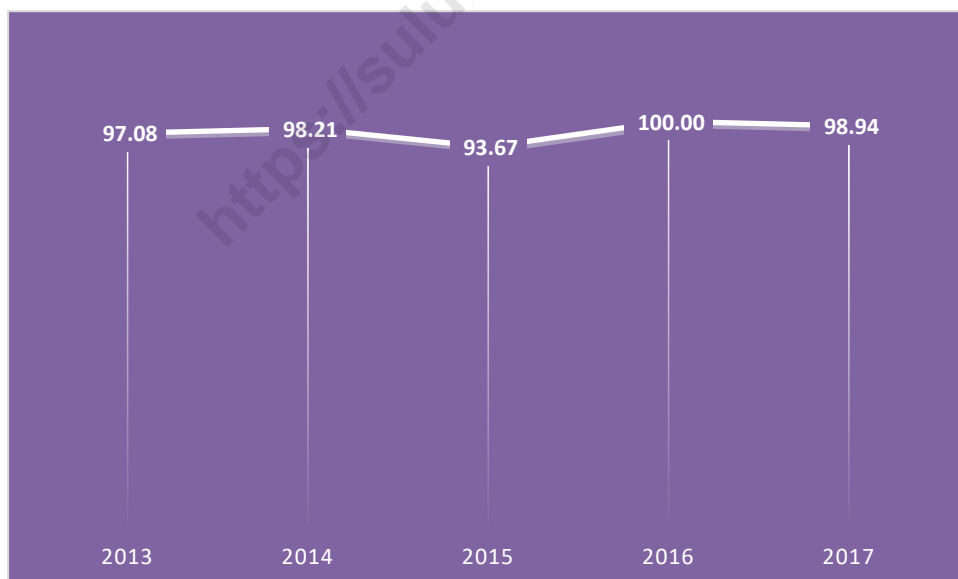
Sementara indikator yang mengalami peningkatan tertinggi adalah ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat. Pada tahun 2016, skor indikator ini adalah 25,00 dan pada tahun 2017 naik signifikan menjadi 100. Kenaikan ini menandakan berkurangnya jumlah ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat. Sementara itu, indikator yang mengalami penurunan terbanyak adalah indikator ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat dan oleh pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat.



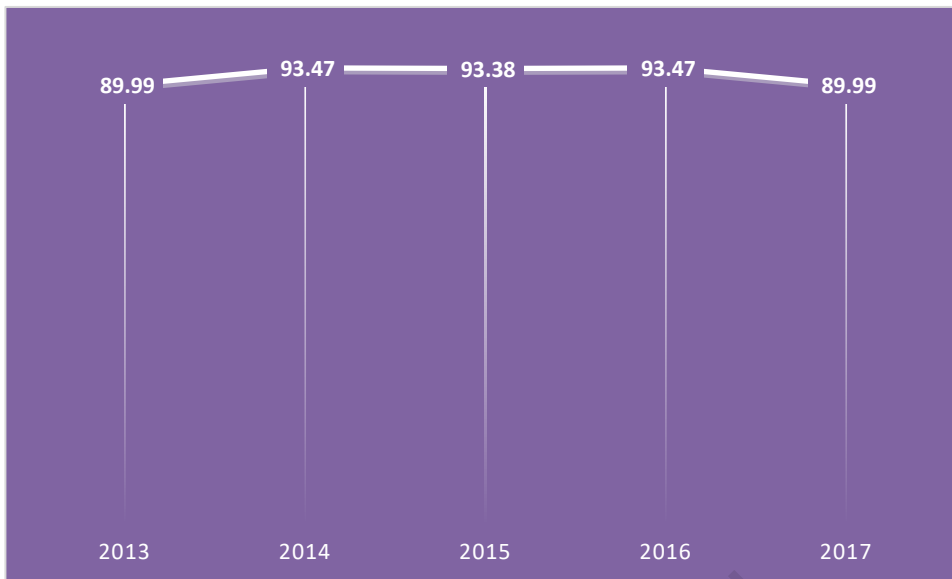
Grafik 3.3
Perkembangan Variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Sulawesi Utara, 2013-2017



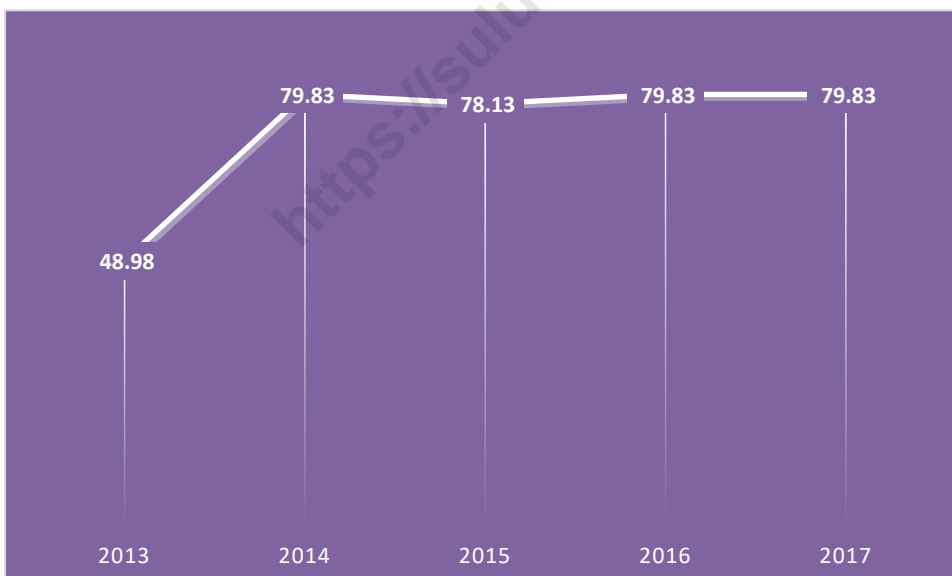
Grafik 3.4
Perkembangan Variabel Kebebasan Berpendapat
Sulawesi Utara, 2013-2017



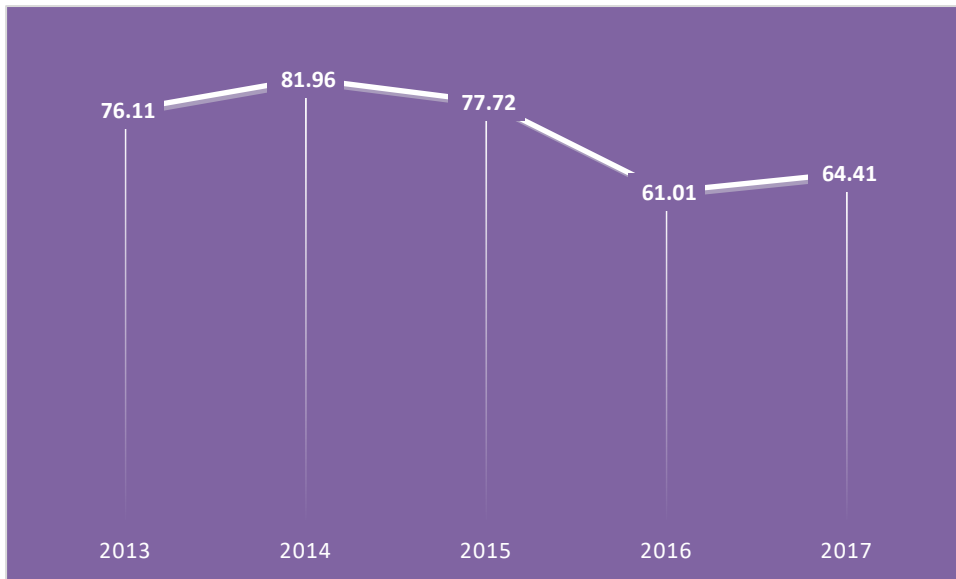
Grafik 3.5
Perkembangan Variabel Kebebasan Berkeyakinan
Sulawesi Utara, 2013-2017



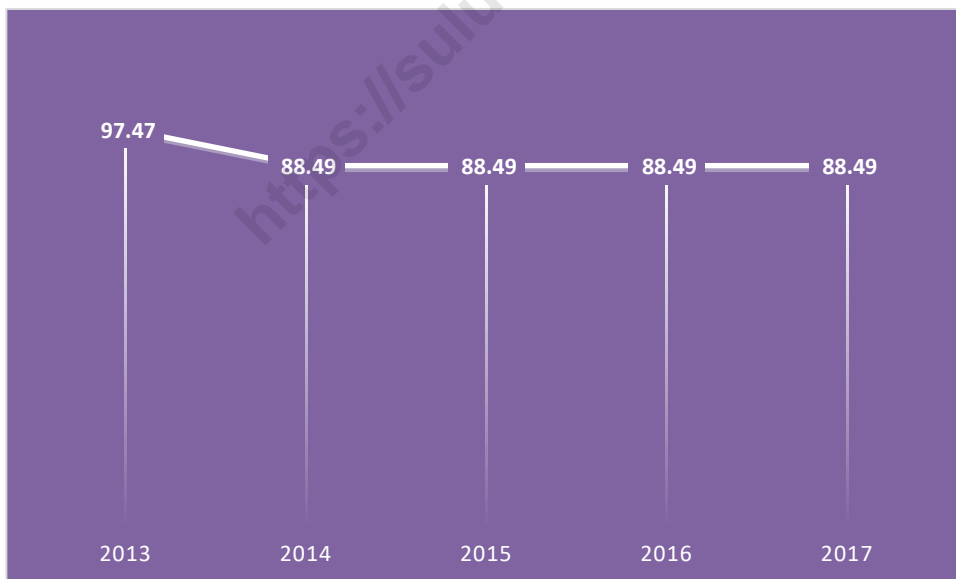
Grafik 3.6
Perkembangan Variabel Kebebasan dari Diskriminasi Sulawesi Utara, 2013-2017



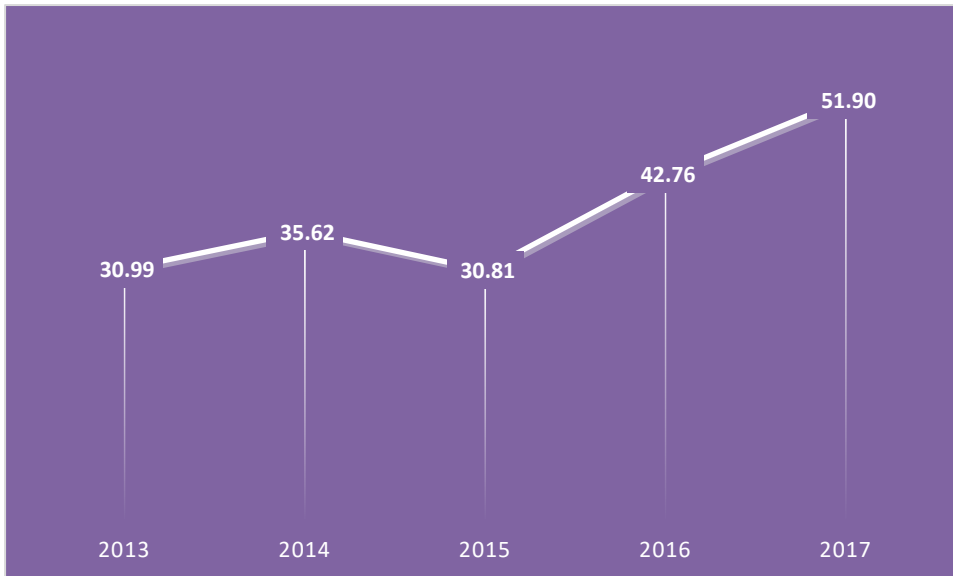
Grafik 3.7
Perkembangan Variabel Hak Memilih dan Dipilih Sulawesi Utara, 2013-2017



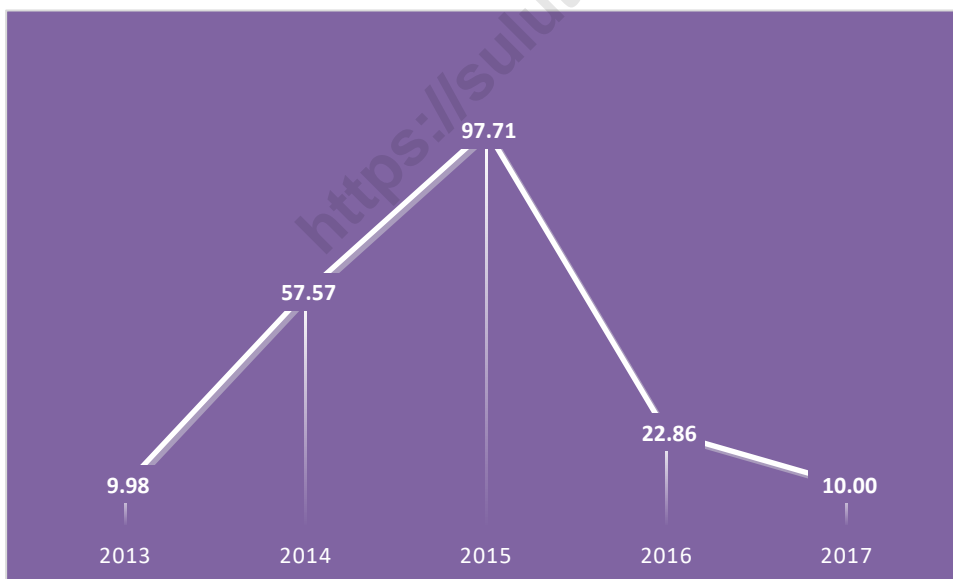
Grafik 3.8
Perkembangan Variabel Partisipasi Politik Dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Sulawesi Utara, 2013-2017



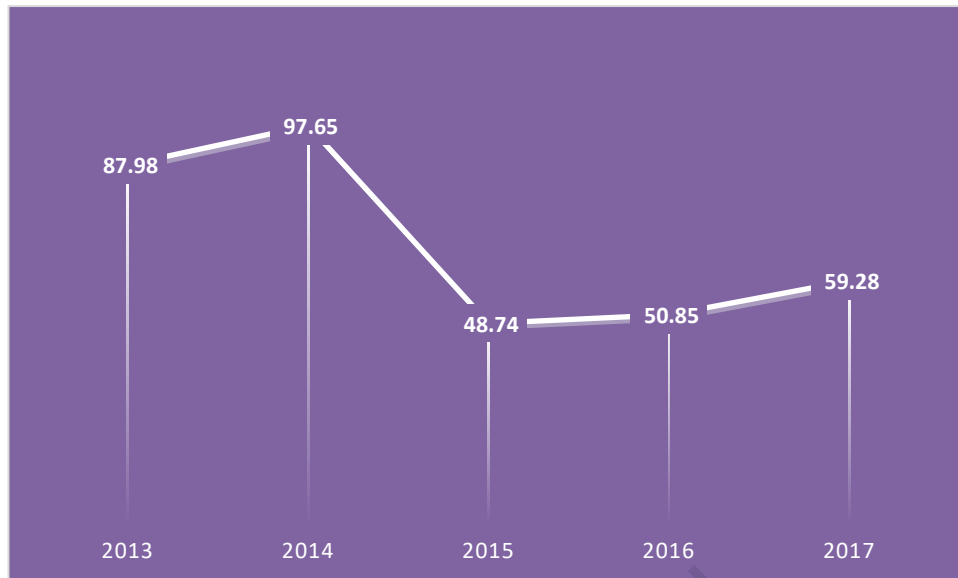
Grafik 3.9
Perkembangan Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil Sulawesi Utara, 2013-2017



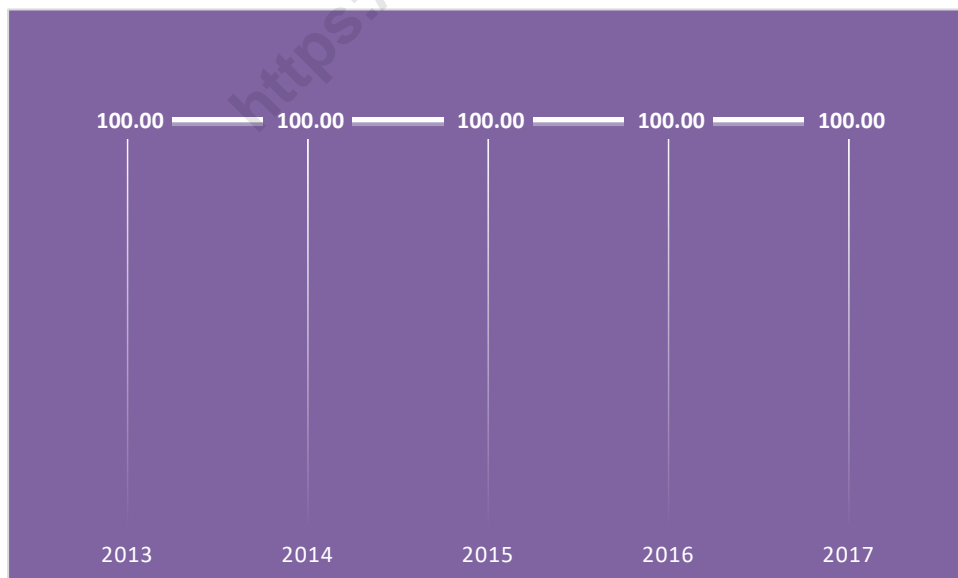
Grafik 3.10
Perkembangan Variabel Peran DPRD Sulawesi Utara, 2013-2017



Grafik 3.11
Perkembangan Variabel Peran Partai Politik Sulawesi Utara, 2013-2017



Grafik 3.12
Perkembangan Variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah Sulawesi Utara, 2013-2017



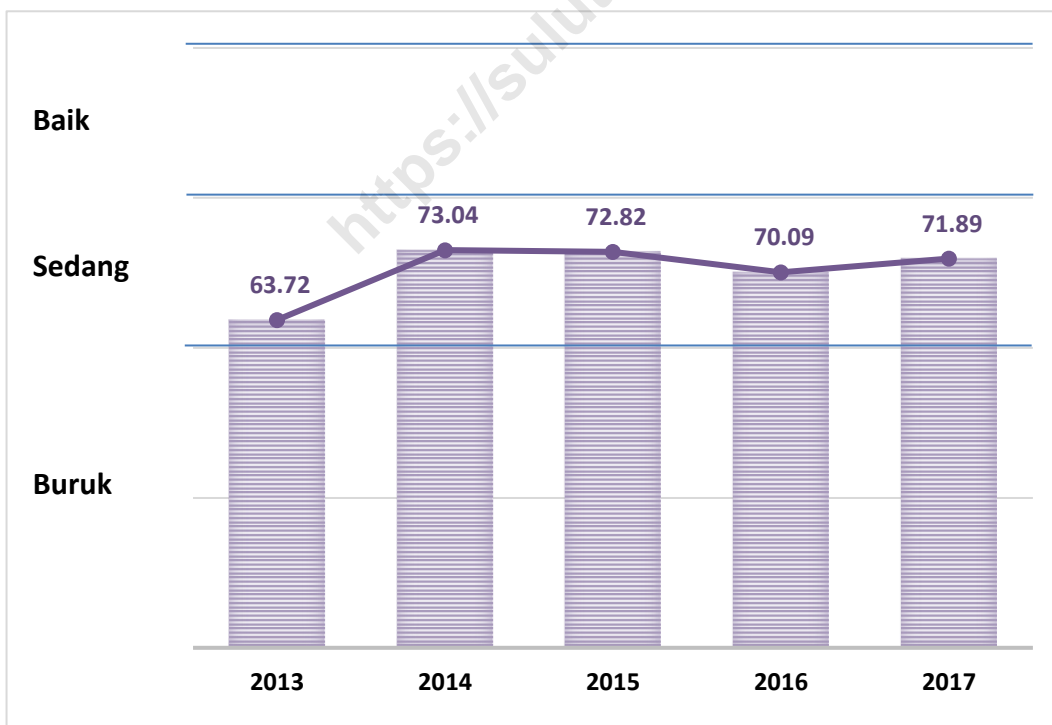
Grafik 3.13
Perkembangan Variabel Peran Peradilan yang Independen Sulawesi Utara, 2013-2017

BAB IV

PERBANDINGAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA ANTAR PROVINSI DI INDONESIA, 2013-2017

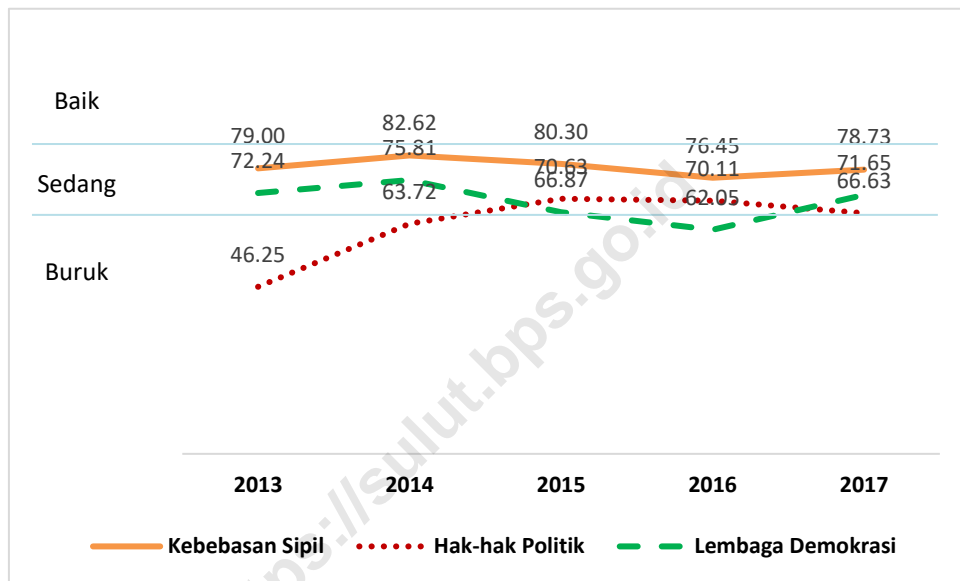
4.1. Gambaran Umum IDI Indonesia

Pada tahun 2017 terjadi peningkatan skor Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) level nasional dari 70,09 menjadi 71,89. Meskipun demikian, kualitas kinerja demokrasi Indonesia secara keseluruhan masih berkategori sedang. Skor IDI 2017 tersebut dipengaruhi oleh nilai dari tiga aspek, yakni aspek kebebasan sipil yang bernilai 78,75; aspek hak-hak politik yang bernilai 66,63; dan aspek lembaga demokrasi yang bernilai 72,49. Bila dibandingkan dengan tahun 2016, aspek lembaga demokrasi dan aspek kebebasan sipil meningkat masing-masing sebesar 10,44 poin dan 2,30 poin, sebaliknya aspek hak-hak politik turun sebesar 3,48 poin.



Grafik 4.1
Perkembangan IDI Nasional, 2013-2017

Pada tahun 2017, tidak ada provinsi yang memiliki skor IDI di bawah 60, artinya tidak ada provinsi dengan IDI berkategori buruk. Sementara itu, terdapat tiga provinsi yang berada di level kinerja demokrasi kategori baik, yakni DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Kalimantan Utara. Tiga puluh provinsi lainnya berada dalam kategori sedang. Hal ini mengindikasikan kinerja demokrasi yang cukup merata di hampir seluruh wilayah Indonesia. Meskipun demikian, skor IDI di 16 provinsi mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016, termasuk Sulawesi Utara.



Grafik 4.2
Perkembangan Indeks Aspek IDI Nasional, 2013-2017

4.2 Perbandingan IDI antarprovinsi

Meskipun skor IDI Sulawesi Utara mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016, IDI Sulawesi Utara masih berada di atas nilai IDI nasional. Dari 33 provinsi di Indonesia, IDI Sulawesi Utara menempati urutan ke-12. DKI Jakarta menempati peringkat pertama dengan nilai IDI mencapai 84,37 dan Papua menempati peringkat terakhir dengan nilai IDI sebesar 60,69. Kisaran skor yang cukup jauh antara yang tertinggi dan terendah dapat mengindikasikan kondisi demokrasi yang cukup beragam antarprovinsi. Ditambah lagi, keragaman ini sekaligus dapat menunjukkan kesenjangan tingkat demokrasi yang lebar antarprovinsi.

Jika dibandingkan dengan provinsi yang ada di Pulau Sulawesi, pada tahun 2017 Sulawesi Utara berada pada posisi pertama dan kemudian diikuti oleh Gorontalo (73,92), Sulawesi Selatan (70,79), Sulawesi Tengah (69,79), Sulawesi Tenggara (68,51), dan di urutan terakhir adalah Sulawesi Barat (67,74).

Tabel 4.1
Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Aspek dan Provinsi, 2016-2017

Provinsi	IDI 2016				IDI 2017			
	IDI	Aspek Kebebasan Sipil	Aspek Hak-hak Politik	Aspek Lembaga Demokrasi	IDI	Aspek Kebebasan Sipil	Aspek Hak-hak Politik	Aspek Lembaga Demokrasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	72,48	92,92	63,94	60,33	70,93	87,27	63,94	61,47
Sumatera Utara	67,37	82,71	62,29	56,13	68,08	74,75	62,29	68,87
Sumatera Barat	54,41	51,01	54,33	58,82	69,50	61,66	61,08	92,72
Riau	71,89	71,78	77,98	62,34	73,41	82,03	66,57	73,41
Jambi	68,89	84,39	65,63	54,58	74,12	86,81	62,08	77,27
Sumatera Selatan	80,95	91,17	81,94	66,53	74,04	90,83	63,90	69,03
Bengkulu	74,23	85,14	63,84	77,01	72,73	88,51	59,42	74,03
Lampung	61,00	60,49	59,32	64,31	72,01	74,12	67,20	77,00
Kep. Bangka Belitung	83,00	87,65	81,09	80,20	80,11	83,07	82,30	72,89
Kepulauan Riau	72,84	85,43	71,28	59,48	76,33	90,84	71,45	65,82
DKI Jakarta	70,85	81,11	67,54	63,19	84,73	87,73	80,86	87,12
Jawa Barat	66,82	73,37	72,34	49,79	68,78	73,61	71,02	59,16
Jawa Tengah	66,71	66,06	67,24	66,69	70,85	69,07	67,24	78,82
D.I, Yogyakarta	85,58	90,00	81,59	86,37	83,61	93,25	82,31	73,55
Jawa Timur	72,24	73,73	76,49	63,63	70,92	78,98	60,98	76,57
Banten	71,36	83,47	68,30	60,99	73,72	85,16	63,87	74,98
Bali	78,95	96,94	69,60	71,18	78,80	95,51	66,80	76,85
Nusa Tenggara Barat	65,41	65,06	62,08	71,13	76,04	79,40	62,08	93,98
Nusa Tenggara Timur	82,49	96,25	81,68	66,46	75,51	79,69	69,75	79,39
Kalimantan Barat	75,28	83,29	75,70	64,54	79,13	97,15	76,36	60,85
Kalimantan Tengah	74,77	84,98	70,66	68,43	76,12	95,58	56,69	82,50

Kalimantan Selatan	73,43	61,04	83,58	72,89	76,25	60,16	81,09	88,79
Kalimantan Timur	73,64	78,25	78,35	60,36	72,86	83,33	67,18	68,72
Kalimantan Utara	76,98	100,00	66,64	64,48	81,06	98,57	68,54	78,93
Sulawesi Utara	76,34	96,31	70,42	60,62	75,76	90,87	72,12	62,54
Sulawesi Tengah	72,20	80,39	67,89	68,76	69,79	90,04	55,88	66,44
Sulawesi Selatan	68,53	75,54	61,51	70,86	70,79	77,48	64,58	72,23
Sulawesi Tenggara	71,13	88,07	55,51	74,66	68,51	77,66	60,49	69,74
Gorontalo	77,48	82,35	75,54	74,42	73,92	85,30	68,18	68,73
Sulawesi Barat	72,37	82,89	69,02	64,47	67,74	73,56	60,84	71,39
Maluku	78,20	87,17	76,18	70,13	77,45	81,78	74,85	76,15
Maluku Utara	73,27	92,27	61,79	67,59	70,73	90,19	65,84	54,02
Papua Barat	60,35	93,67	38,05	53,85	62,76	92,42	39,05	63,14
Papua	61,02	92,15	41,13	53,45	61,34	89,09	42,16	56,91
INDONESIA	70,09	76,45	70,11	62,05	72,11	78,75	66,63	72,49

DAFTAR PUSTAKA

Kemenkopolhukam, Kementerian PPN, Kemendagri, BPS, dan UNDP, 2015. *Indeks Demokrasi Indonesia 2015: Urgensi Penguatan Kultur Demokrasi*. Jakarta : Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Badan Pusat Statistik (BPS), 2017. *Indeks Demokrasi Indonesia Sulawesi Utara Tahun 2012 – 2016*. Manado : BPS Provinsi Sulawesi Utara.

Badan Pusat Statistik (BPS), 2018. *Berita Resmi Statistik Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulawesi Utara Tahun 2017*. Manado : BPS Provinsi Sulawesi Utara.

Badan Pusat Statistik (BPS), 2018. *Berita Resmi Statistik Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2017*. Jakarta : BPS.

<http://unsplash.com/>

<https://sulut.bps.go.id/>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Jl. 17 Agustus, Manado 95119

Telp. : (0341) 847004

Homepage: sulut.bps.go.id

Email : bps7100@bps.go.id